

**SUMBER DANA DAN SYARAT PADA AKAD "QARDHUL HASAN"
DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG GUBENG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH :

IKA PURWATI
NIM : C02207160



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS * S-2011 003 M	No. REG : S-2011/M/003 ASAL BUKU : TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

BETA

JL. KETINTANG 142 SURABAYA
T. P. O. BOX 1001
60156 SURABAYA
(031) 8255288

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Purwati
NIM : C02207160
Semester : VIII
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Berbek RT.01/RW.02 , Waru-Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul *“Sumber Hukum dan Syarat pada Akad Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng dalam Perspektif Hukum Islam”* adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian atau seluruhnya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2011

Saya yang menyatakan



Ika Purwati
C02207160

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ika Purwati (C02207160) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 Juni 2011

Pembimbing,



**Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001**

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ika Purwati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Sekretaris,

Fahrur Ulum, S.Pd, MEI
NIP. 197209062007101001

Penguji I,

Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji II,

Siti Musfiqoh, MEI
NIP. 197608132006042002

Pembimbing

Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Surabaya, 29 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

BAB II	KONSEP <i>AL-QARD AL-HASAN</i> DALAM ISLAM.....	23
	A. Pengertian <i>al-Qard</i> dan <i>al-Qard al-Hasan</i>	20
	B. Dasar Hukum <i>al-Qard al-Hasan</i>	22
	C. Rukun dan Syarat <i>al-Qard al-Hasan</i>	26
	D. Kosekuensi Hukum <i>Qard</i>	29
	E. Syarat yang Sah dan yang Tidak Sah (Fasid).....	30
	F. <i>Qard</i> yang mendatangkan keuntungan.....	32
	G. Aplikasi <i>al-Qard</i> dalam perbankan syari'ah.....	33
	H. Sumber Dana <i>al-Qard al-Hasan</i>	34
	I. Perbedaan <i>al-Qard</i> dan <i>al-Qard al-Hasan</i>	35
	J. Manfaat dan Resiko <i>al-Qard</i>	36
BAB III	SUMBER DANA DAN SYARAT PADA AKAD QARDHUL HASAN DI BMT UGT CABANG GUBENG	38
	A. Profil Singkat BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng	38
	1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri.....	38
	2. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng.....	39
	3. Maksud dan Tujuan	41
	4. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng	41
	5. Struktur Organisasi, Personalia, dan Divisi tugas.....	42
	6. Permodalan	47
	7. Pertumbuhan SHU	47

Dalam persoalan ekonomi khususnya yang berprinsip syari'ah juga bermacam-macam bahasannya antara lain syirkah, jual beli, gadai, utang piutang dan masih banyak lagi. Diantara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya di kalangan masyarakat adalah pinjam meminjam dan utang-piutang. Bentuk kerjasama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai moderator antara masyarakat kelebihan dana dengan kelompok masyarakat kekurangan dana.

Menurut Subagio, lembaga keuangan mempunyai fungsi antara lain:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrument kredit.
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.
3. Memberikan pengetahuan tentang tugas-tugas lembaga keuangan dan informasi yang berguna untuk menguntungkan bagi nasabah.
4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.

Salah satu BMT yang berkembang pesat saat ini di Jawa timur adalah BMT UGT Sidogiri yang memiliki banyak cabang, dan salah satunya yaitu cabang Gubeng.

Dalam Baitul Maal wat Tamwil (BMT) UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri cabang Gubeng terdapat beberapa jasa pembiayaan antara lain, “*Mudharabah*”, “*Musyarakah*”, “*Murabahah*”, “*Bai’ Bitsamanil Ajil*”, serta “*Qardhul Hasan*”. Diantara produk pembiayaan tersebut yang paling diminati adalah “*Bai’ Bitsamanil Ajil*”.

Pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* merupakan produk pelengkap yang berbentuk pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT selaku *sahibul māl* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana baik untuk keperluan yang bersifat konsumtif ataupun keperluan yang bersifat produktif (untuk modal usaha).

Mengenai sumber dana yang dipakai BMT dalam memberikan pinjaman kepada anggota atau nasabah untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari dana simpanan anggota berupa tabungan. Apabila peminjam (*muqtariḍ*) tidak dapat mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan maka peminjam akan di *reschedule* (di akad ulang) kapan peminjam bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

Dalam teorinya, *al-Qard al-Hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. *al-Qard al-Hasan* adalah produk perbankan syariah untuk

nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam.⁵

Pada Lembaga Keuangan Syariah mikro atau yang dikaji dalam hal ini secara umum pada pola kerja BMT, ditemukan pola yang efektif dalam pengembangan usaha mikro dengan metode optimasi fungsi ekonomi BMT, yaitu menggunakan model pembinaan khusus bagi pelaku usaha pemula dan mikro sebagai landasan awal untuk mengenalkan system industri yang dapat dikembangkan nantinya melalui modal dari dana komersil.

Pengembangan produk Baitul Maal *al Qard* dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan Baitul Maal. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT (*Tamwil dan Māl*). Dalam keadaan ini, *al qard* dapat dikembangkan lagi menjadi *al-Qard al-Ḥasan*, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq atau sedekah.⁶

BMT dapat membentuk unit kerja khusus yang menangani masalah zakat, infaq, dan sedekah baik untuk kalangan internal maupun eksternal BMT. Dana sosial yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membuktikan komitmen

⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah- Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 111.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* 174.

memberikan imbalan atas tanda jasa pinjaman yang diberikan BMT itulah sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas tentang *Sumber Dana dan Syarat pada Akad Qardhul Hasan di BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng dalam Perspektif Hukum Islam*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah yang dijadikan pembahasan dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Peran BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng dalam membantu permasalahan ekonomi rakyat kecil yang ada disekitarnya.
2. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.
3. Sumber dana yang digunakan pada produk *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.
4. Perspektif hukum Islam terhadap sumber dana pada produk *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.
5. Pemberlakuan nadzar untuk memberikan imbalan atas jasa pinjaman sebagai syarat pembiayaan *Qardhul Hasan*.
6. Pemberlakuan syarat terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri dalam perspektif hukum Islam.

jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹³

Masalah tentang pembiayaan yang telah diterapkan oleh sebagian besar BMT di Indonesia khususnya di Jawa Timur seperti pembiayaan *Mudārabah*, *Murābahah*, *Musyārahah*, *Ijarah*, dan *Rahn*, sebenarnya sudah banyak yang membahas sebelumnya, terutama di kalangan mahasiswa-mahasiswa UIN, IAIN maupun STAIN. Untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya belum ada yang membahas sebelumnya.

Penulis menemukan beberapa penelitian yang menyangkut secara umum tentang *Qardhul Hasan*, antara lain¹⁴:

1. Muhammad Akhyar Adnan mengkaji tentang “Evaluasi *Non Performing Loan* (NPL) Pinjaman *Qardhul Hasan* (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)”. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan NPL *Qardhul Hasan* di BNI syariah.
2. Ismail Faruk (2004) mengkaji tentang operasionalisasi al-qard al-hasan dan upaya-upaya yang dilakukan BNI Syariah Cabang Yogyakarta dalam pengumpulan dana yang akan disalurkan dalam produk al-qard al-hasan dalam membantu pemberdayaan ekonomi rakyat, yang kemudian dianalisa dengan hukum Islam. Hasil penelitian Faruk menunjukkan BNI Syariah

¹³ Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2011, 9.

¹⁴ Muhammad Akhyar Adnan, “EVALUASI NON PERFORMING LOAN (NPL) PINJAMAN QARDHUL HASAN (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)”, <http://journal.uii.ac.id/index.php/JAAI/article/view/397/312>.



Yogyakarta melakukan langkah-langkah sesuai dengan hukum Islam atau Syariah untuk lebih mengoptimalkan peran dan upayanya dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat melalui produk *Qardhul Hasan*.

3. Dodi Tisna Amijaya (2003) dalam penelitiannya menguraikan tentang bagaimana penyelesaiannya apabila muqtaridh terlambat membayar angsuran atas pinjaman pada akad perjanjian pembiayaan al-qard al-hasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian apabila muqtaridh terlambat melaksanakan prestasi atas akad perjanjian yang dilakukan dalam pinjaman qardhul hasan (soft and bene-volent loan) pada Bank BNI Syariah Yogya-karta adalah dengan cara musyawarah. Sesuai dengan pasal 1 dalam akad perjanjian qardhul hasan bahwa perjanjian pembiayaan ini semata-mata dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT., saling percaya, semangat ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung sosial (Corporate social responsibility), sehingga dalam kelalaian Muqtaridh tidak ada pemaksaan terhadap Muqtaridh yang sifatnya menekan dan mengintimidasi yang berarti ada niat Bank untuk menjalin persatuan atau ukhuwah Islamiyah.

Sedangkan dalam skripsi ini pembahasannya ditekankan pada sumber dana dan syarat pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri. Sehingga skripsi ini berbeda dengan skripsi yang lain dan bukan merupakan pelagiat.

dengan istilah yang lain dan penulisannya tidak menggunakan transliterasi sesuai dengan petunjuk yang penulis pakai.

2. Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat bagi semua orang yang terbebani hukum.¹⁸ Dalam skripsi ini hukum Islam yang dipakai menyangkut akad *al Qard'* yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, dan ijma'.
3. BMT UGT Sidogiri: Merupakan kepanjangan dari *Baitul Māl wa Tamwīl* Usaha Gabungan Terpadu yang pusatnya ada di jalan Sidogiri kecamatan Kraton kabupaten Pasuruan.

I. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan data yang digunakan berasal dari lapangan yakni data dari transaksi yang ada di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini perlu diketahui tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Data dan Sumber Data

Data yang dihimpun:

¹⁸ Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005), 201.

memberikan keterangan pada si peneliti.¹⁹ Wawancara tersebut dilakukan dengan melalui tanya jawab kepada pihak-pihak terkait, yaitu pimpinan dan karyawan BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.

- b. Metode dokumentasi yaitu mencari dan mencatat semua data yang mempunyai keterkaitan dengan topik *Qardhul Hasan*.

3. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.²⁰ Kualitatif dalam skripsi ini merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari wawancara dan dokumentasi.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dan selanjutnya penulis harus menggali lebih dalam guna mengetahui apa yang terdapat di belakang fakta dari yang terlihat atau terdengar tersebut.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian-suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumi aksara, 1995), 64.

²⁰ Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5.

Serta berpola pikir deduktif yaitu cara memberi alasan dengan berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau spesifik.²¹ Dalam hal ini menjelaskan data tentang *al-Qard al Hasan* dari segi perspektif hukum Islam dan selanjutnya akan di aplikasikan secara khusus dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini direncanakan disajikan dalam lima bab yang saling terkait. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara satu bab dengan bab lainnya dan tidak keluar dari pokok masalah yang telah ditentukan, maka skripsi ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I yakni pendahuluan yang topiknya terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan teori dari penelitian yang membahas tentang konsep *al-Qard* dalam Islam, meliputi: pengertian *al-Qard* dan *al-Qard al-Hasan*, dasar hukum *al-Qard*, rukun dan syarat *al-Qard*, sumber dana *al-Qard al-Hasan*, hal

²¹ Moh. Nasir, Ph. D, *metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 197.

yang membedakan antara akad *al-Qard* dengan *al-Qard al-Hasan* dalam hukum Islam, serta aplikasi *al-Qard al-Hasan* dalam perbankan syari'ah.

BAB III merupakan laporan hasil penelitian yang membahas tentang profil singkat BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng dan produk pembiayaan *Qardhul Hasan* yang meliputi data sumber dana dan syarat pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng.

BAB IV merupakan analisis data dari hasil penelitian yang membahas antara lain tentang analisis sumber dana dan syarat pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri serta sumber dana dan syarat pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri dalam perspektif hukum Islam.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

Rukun *Qard* ada empat, yaitu:

1. *Ṣigat* (ijab qabul/serah terima)
2. Objek akad/ *Muqtarad* (barang yang dipinjamkan)
3. Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*Muqrid*), serta,
4. Penerima pinjaman (*Muqtarid*)¹¹

Syarat *Qard*:

1. Mengenai *ṣigah*-nya maka bisa menggunakan lafal *qardh* atau *salaf* karena keduanya digunakan dalam lafal syariat. Dbolehkan juga dengan lafal yang semakna dengan keduanya seperti kata-kata. “*Mallaktuka hāzā ‘alā an tarudda alayya badalahu* (aku berikan kepemilikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku).”¹² Dengan kata lain *ṣigat* atau ijab qabul merupakan kesepakatan antara peminjam dengan pemberi pinjaman.
2. Syarat *Muqrid* (pemberi hutang) harus memenuhi kriteria:
 - a. *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial). Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlaq menurut pandangan syariat. Contoh: orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang dilarang syariat, semisal membeli minuman keras, narkoba dan lain

¹¹ Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalati 'Allām al-Ghuyūb*, 274.

¹² Abdul Hayyie al Kaffani dkk, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (penerjemah Arab oleh Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 375.

sebagainya. Menurut syari'at, anak kecil, orang gila, dan hamba sahaya (budak) tidak berhak untuk membelanjakan hartanya (bukan termasuk *ahliyat at-Tabarru'*).

- b. *Ikhtiyār* (tanpa ada paksaan). *Muqrid* (pihak pemberi hutang) di dalam memberikan hutangan, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.¹³

3. Syarat *Muqtariḍ* (pihak yang berhutang)

Muqtariḍ (pihak yang berhutang) harus yang merupakan orang yang *ahliyah mu'āmalah*. Maksudnya ia sudah baligh, berakal waras, dan tidak *mahjūr* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memnuhi syarat.¹⁴

4. Syarat objek akad *Qarḍ* (barang yang dipinjam)

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *Qarḍ* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad *salam*, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan, maupun dari harta *qimmiyat*, seperti barang-barang dagangan, binatang dan juga barang yang dijual satuan. Alasan

¹³ Dumairi Nor dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (penerjemah arab: Abu Bakr bin Muhammad Syatha al-Bakri, *Hāsiyat I'ānat at-Ṭālibin*), 50.

¹⁴ *Ibid.*, 103.

maka wajib baginya mengembalikan harta semisal jika hadiah itu berupa barang *misli* dan nilai yang sesuai jika barang *qimiy*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *Qard* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu.

G. Aplikasi *al-Qard* dalam Perbankan syari'ah

Akad al-Qardh biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qard al-hasan*.¹⁹

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 133.

Dari pemaparan diatas bahwa sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan *al-Qard al-Hasan* yaitu dari dana sosial meliputi dana *qard* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah dan sebagainya) serta dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non halal.

BMT dapat membentuk unit kerja khusus yang menangani masalah zakat, infaq, dan sedekah baik untuk kalangan internal maupun eksternal BMT. Dana sosial yang terkumpul kemudian disalurkan untuk membutuhkan komitmen sosial. Khusus dana yang bersumber dari zakat, infaq dan sedekah dapat dikembangkan ke dalam akad *al-Qard al-Hasan*.

I. Perbedaan *al-Qard* dan *al-Qard al-Hasan*

Bank syariah disamping memberikan pinjaman *al-Qard*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *al-Qard al-Hasan*. Perbedaan antara keduanya antara lain:

1. *Al-Qard* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, sedangkan *al-Qard al-Hasan* pemberian pinjaman kepada orang lain, dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya. Sehingga *al-Qard al-Hasan* ini dianggap sedekah. Walaupun pada prinsipnya *al-Qard al-Hasan* ini bukanlah produk yang *profitable* namun tetap harus

Awal 1418 H atau 17 juli 1997 M berdirilah BMT Sidogiri pertama yang bernama BMT Masalah Mursalah Lil Ummah (MMU).

Kehadiran BMT ini mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar pondok. Karena dengan adanya BMT ini, masyarakat tidak lagi khawatir akan adanya prakter riba yang terjadi di masyarakat dan tidak terjerat hutang dari para rentenir.

2. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri Cabang Gubeng

Pada tahun 2000 para pengurus BMT Sidogiri ingin mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia, yang mana daerah tersebut ada alumni dari pondok Sidogiri. Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri cabang Surabaya diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Kemudian tempat ke dua bertempat di Jember, dan hal itu berlanjut hingga sekarang. Sehingga BMT-UGT Sidogiri telah membuka cabang sebanyak 102 unit.

Kehadiran BMT Sidogiri Cabang Gubeng yang terletak di jalan Pucang Anom nomer 06 adalah karena ada banyaknya praktek riba yang terjadi di daerah Gubeng. Dengan tujuan untuk membersihkan praktek riba yang terjadi di masyarakat, maka dibentuklah tim survei untuk memilih lokasi pendirian BMT Cabang Gubeng. Tim survei tersebut beranggotakan:

1. Bapak Khoirul Anam
2. Bapak Muhammad Bahri
3. Bapak KH. Abdurrahman Nafiz

terlaksana dengan baik seperti pak Anam yang beroperasi di daerah pasar kerampung. Begitu juga dengan pegawai yang lain.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Koperasi ini bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
- b. Koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT.

4. Visi dan Misi BMT-UGT Sidogiri Cab. Gubeng

Adapun visi dan misi Koperasi BMT-UGT Sidogiri Cab. Gubeng adalah :

a. Visi

- 1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan Syari'ah Islam.
- 2) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

b. Misi

- 1) Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- 2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.

- 3) Meningkatkan kesejahteraan Ummat dan anggota.
- 4) Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).

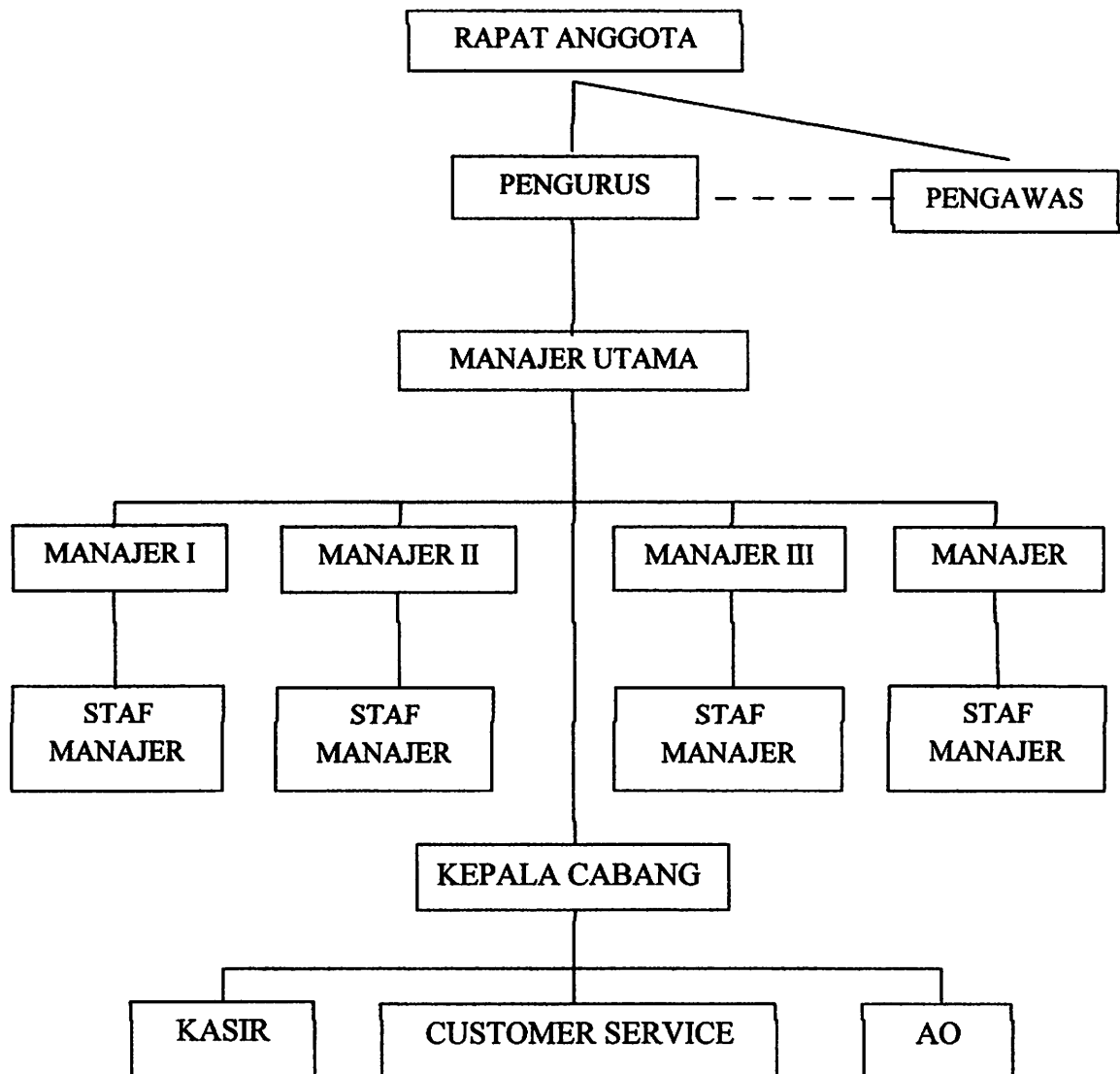
5. Struktur Organisasi, Personalia Dan Divisi Tugas

1) Struktur Organisasi BMT-UGT Sidogiri

Struktur organisasi BMT-UGT Sidogiri yaitu:

- a. Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam BMT-UGT Sidogiri. Rapat anggota dapat memutuskan perubahan AD dan RT (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga), menetapkan susunan pengurus, pengawas dan lain-lainnya.
- b. Pengurus BMT-UGT Sidogiri diangkat dan dipilih oleh anggota melalui mekanisme rapat anggota. Pengurus mengemban amanah dari anggota dan menjalankan program kerja yang telah ditetapkan oleh dalam rapat anggota. Pengurus berhak mengangkat manajer atau direktur untuk menjalankan roda usaha BMT-UGT Sidogiri. Pengangkatannya dituangkan melalui kontrak kerja dengan batas waktu tertentu.
- c. Pengawas memiliki kedudukan yang sejajar dengan pengurus yang diangkat dan diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. susunan pengawas terdiri dari Pengawas Bidang Manajemen, pengawas bidang keuangan dan pengawas bidang syariah.
- d. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus dengan sistem kontrak kerja dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.

STRUKTUR ORGANISASI BMT-UGT SIDOGIRI



KETERANGAN

- : GARIS INTRUKSI/PERINTAH
 - - - - - : GARIS KOORDINASI

masuk menjadi anggota koperasi dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian, simpanan pokok yang ditetapkan BMT-UGT Sidogiri Rp. 1.000.000

- b) Simpanan wajib menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Simpanan wajib yang ditetapkan BMT-UGT Sidogiri Rp.100.000 kepada setiap anggota.
- c) Simpanan khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Simpanan hanya bisa ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan mendapatkan porsi laba/SHU pada setiap akhir tahun secara proposional dengan jumlah modalnya.
- d) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan dari SHU sebesar 20%
- e) Hibah²

² Laporan Rapat Anggota Tahunan 2010 BMT-UGT Sidogiri.

2008	150.273.760	451.042.204
2009	265.502.200	738.612.778
2010	386.045.733	1.214.433.571

9. Produk Koperasi BMT-UGT Sidogiri Cab. Gubeng

Pemilik harta (*Ṣāhibul Māl*) menyimpan dananya di BMT-UGT dengan akad *Muḍarabah Mutlaq* atau *Wadi'ah Yad aḍ-Ḍamānah*. Keuntungan bagi penabung : (1) pahalanya berlipat 18 kali apabila diniatkan untuk menghutangi. (2) aman dan terhindar dari riba dan haram (3) ikut membantu sesama umat (*Ta'āwun*). (4) mendapat imbalan bagi hasil yang halal.

a. Produk Tabungan BMT-UGT Sidogiri:

1. *Tabungan Umum*
2. *Tabungan Peduli Siswa*
3. *Tabungan Idul Fitri*
4. *Tabungan Ibadah Haji Dan Umrah*
5. *Tabungan walimah*
6. *Mudhorobah Berjangka (Deposito)*

b. Produk Pembiayaan BMT-UGT Sidogiri:

BMT-UGT memberikan pembiayaan dengan menggunakan skema sebagai berikut :

1. *Mudhorobah (bagi hasil)*

2. *Murobahah (modal kerja)*
3. *Musyarokah (penyertaan)*
4. *Bai' Bitsamanil Ajil (investasi)*
5. *Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan)*

c. Syarat-syarat dan ketentuan produk pembiayaan BMT-UGT

Sidogiri

1. Mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan
2. Foto copy KTP suami dan istri atau wali
3. Foto copy KSK/KK
4. Foto copy akta nikah
5. Foto copy jaminan
6. Foto copy legalitas bagi bada usaha
7. Menjadi anggota atau mitra usaha

d. Produk Jasa

Koperasi UGT Sidogiri juga mempunyai produk jasa yaitu Jasa Pelayanan transfer. Pelayanan transfer merupakan jasa pelayanan pengiriman uang yang diberikan pada masyarakat baik penabung maupun bukan penabung melalui kantor cabang Koperasi UGT Sidogiri Unit BMT setempat kepada Para santri (*Banāt/Banīn*) yang sedang menempuh Pendidikan di PPS Sidogiri.

mengingat pembiayaan *Qardhul Hasan* ini merupakan pinjaman kebijakan yang memiliki resiko terhitung tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Sumber dana *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng berasal dari dana tabungan anggota dengan ketentuan apabila pinjaman tersebut berada dalam skala kecil yakni kurang dari Rp. 1.000.000,00,-. Apabila lebih dari itu maka dana *Qardhul Hasan* diambil dari dana sosial yang diambil dari pusat.

Untuk sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diambil dari dana tabungan dengan alasan karena fungsi *Baitul Mal* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng tidak berfungsi. Hal ini berarti hanya *Baitut Tamwil* yang berfungsi secara baik. Tabungan yang digunakan sumber dana *Qardhul Hasan* tersebut yaitu tabungan umum dengan akad *wadfi'ah yad ad damanah*. Dari tabungan tersebut anggota mendapatkan bagi hasil dari hasil pembiayaan yang ada di BMT, termasuk dari pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Dari pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan kepada peminjam, BMT selaku *sahibul mal* sangat mengharapkan pinjaman tersebut kembali, karena dana yang digunakan merupakan dana umat yang harus dipertanggungjawabkan.

Dengan kata lain, pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT tersebut merupakan akad qardh yang hanya ada hutang pokok, lalu adanya penambahan nama *hasan* itu merupakan imbalan yang diberikan kepada *sāhibul māl* atas tanda jasa, dan besarnya tidak boleh ditentukan.

Contoh kasus: Bapak Fulan mengajukan pembiayaan kepada BMT dengan akad *Qardhul Hasan* sebesar Rp. 500.000 pada tanggal 21 Desember 2010 dan akan dilunasi dengan mengangsur sebanyak 3 kali selama 3 bulan disertai dengan imbalan atas pinjaman yang disamakan dengan bagi hasil yang ada pada pembiayaan lain sebesar 3% dalam setiap bulan. Pada tanggal 21 Januari 2011 bapak Fulan mengangsur untuk yang pertama kali sebesar Rp. 166.700 dengan imbalan atas pinjaman sebesar 3% dari Rp. 500.000 yakni Rp. 15.000. Dikarenakan bapak Fulan tidak bisa mengangsur untuk bulan yang ke dua, sisa hutang bapak Fulan sebesar Rp. 333.300 dan itu dilunasi pada angsuran ke tiga beserta imbalan atas jasa pinjaman sebesar Rp. 15.000.

Imbalan atas jasa pinjaman sebesar Rp. 15.000 yang diberikan dalam dua kali pembayaran yakni sebesar Rp. 30.000 tersebut dinamakan *hasan* dan itu masuk dalam pendapatan BMT yang kemudian setiap tahunnya BMT mengeluarkan zakat dari hasil pendapatan tersebut.

Alasan BMT menghimbau kepada peminjam untuk bernadzar memberikan imbalan atas jasa pinjaman yang telah diberikan yaitu untuk mengikat keseriusannya dalam menggunakan dana yang dipinjam dan agar peminjam dapat melunasinya tepat pada waktu yang telah disepakati.

Peminjam diharuskan mengembalikan hutang pokok beserta imbalan pada waktu yang telah ditentukan, baik dengan cara mengangsur atau dengan cara dibayar tunai. Apabila peminjam (*muqtariḍ*) tidak dapat mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan maka peminjam akan di *reschedule* (di akad ulang) kapan peminjam bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

BMT memberikan pembiayaan menggunakan akad *Qardhul Hasan* dengan tujuan daripada peminjam terjatuh di tangan rentenir yang memberikan hutang dengan menerapkan bunga yang lebih besar dan merupakan riba yang diharamkan dalam syari'at Islam, lebih baik peminjam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Dimana *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang berprinsip pada syari'at Islam dan tentunya terhindar dari riba.

Al-Qard al-Hasan merupakan wahana baru bagi perbankan syari'ah (termasuk BMT), dimana *al-Qard al-Hasan* merupakan pengembangan dari produk *al-Qard* seiring dengan upaya pengembangan *Baitul Māl*. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT (*Tamwīl dan Māl*). Dalam keadaan ini, *al Qard* dapat dikembangkan lagi menjadi *al-Qard al-Hasan*, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq atau sedekah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III bahwa suatu lembaga keuangan (termasuk BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng) dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat khususnya yang berupa pembiayaan *Qardhul Hasan*, sangat berhati-hati dan selektif. Karena mengingat pembiayaan *Qardhul Hasan* ini merupakan pinjaman kebajikan yang memiliki resiko terhitung tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri merupakan pinjaman kebajikan yang diberikan oleh BMT selaku *ṣāhibul māl* (pemilik harta) kepada anggota yang memerlukan dana baik untuk keperluan yang bersifat konsumtif ataupun produktif (untuk modal usaha).

Sumber dana *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng berasal dari dana tabungan anggota dengan ketentuan apabila pinjaman tersebut berada dalam skala kecil yakni kurang dari Rp. 1.000.000,00,-. Apabila lebih dari itu maka dana *Qardhul Hasan* diambil dari dana sosial yang diambil dari pusat.

Hal ini dapat diartikan bahwa pinjaman *Qardhul Hasan* di BMT tersebut selain pinjaman yang diberikan dalam skala kecil *Qardhul Hasan* juga diberikan dalam jumlah yang besar juga. Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT tersebut tetap diminta jaminan untuk mengikat pinjaman yang diberikan.

Sedangkan akad *al-Qard al-Hasan* seperti yang telah dibahas pada bab II, bahwa *al-Qard al-Hasan* merupakan bagian dari akad *al-Qard* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber lain yang dapat dialokasikan untuk *al-Qard al-Hasan*, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa *nostro* di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingatkan jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga nonmuslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam.

Dana sosial (zakat, infaq, sedekah) perlu dikembangkan sebagai sumber dana *al-Qard al-Hasan* supaya dana sosial tersebut lebih bermanfaat khususnya untuk modal usaha dan tidak hanya dihabiskan dalam waktu singkat tanpa memberikan dampak yang berarti.

hal ini sangat diperlukan adanya jaminan untuk mengikat pinjaman yang diberikan.

Untuk dana yang bersumber dari dana simpanan (tabungan) anggota digunakan untuk pinjaman dalam jumlah kecil. Walaupun pinjaman tersebut dalam jumlah kecil pihak BMT terkadang juga masih meminta jaminan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan.

Dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan kepada peminjam, pihak BMT sangat mengharapkan pinjaman tersebut kembali. Khususnya pinjaman yang berasal dari dana tabungan anggota yang sewaktu-waktu anggota tersebut akan mengambil simpanannya. Begitu juga dana yang bersumber dari dana sosial yang digunakan untuk pinjaman dalam jumlah besar yang tentu saja BMT mengharuskan pinjaman tersebut kembali karena dana tersebut merupakan dana umat yang harus dipertanggungjawabkan.

Walaupun dalam teori, *al-Qard al-Hasan* berasal dari dana sosial namun justru dari dana sosial itu yang sebaiknya digunakan untuk pinjaman dalam jumlah kecil. Karena pada dasarnya *al-Qard al-Hasan* ditujukan untuk membantu sektor usaha yang sangat kecil. Jadi apabila peminjam benar-benar dirasakan tidak bisa mengembalikan, maka BMT bisa menganggapnya sebagai sedekah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber dana pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng yang menggunakan tabungan umum anggota diperbolehkan dengan alasan peminjam mampu mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya dan tidak merugikan BMT selaku *sahibul māl* (pemilik dana).

B. Analisis Syarat pada Akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Cabang Gubeng dalam Perspektif Hukum Islam

Sesuatu yang disebut wajar apabila dalam kegiatan usaha mempunyai tujuan yang ingin dicapainya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng dalam usahanya untuk meningkatkan jumlah nasabah.

Ketentuan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng sebagai berikut:

1. BMT menyediakan dana yang diperlukan.
2. BMT menghimbau peminjam untuk bernadzar memberikan imbalan atas jasa pinjaman yang telah diberikan.
3. BMT berhak menagih pengembalian hutang pokok dan imbalan atas jasa pinjaman yang telah diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang penulis peroleh selama praktikum yang dimulai pada tanggal 16 Mei sampai 16 Mei 2011 di BMT-UGT Sidogiri cabang Gubeng, maka berdasarkan data konkrit dari tempat langsung dan wawancara penulis yang kemudian ditinjau dalam perspektif hukum Islam dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sumber dana *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng berasal dari dana tabungan umum anggota dengan ketentuan apabila pinjaman tersebut berada dalam skala kecil yakni kurang dari Rp. 1.000.000,00-,. Apabila lebih dari itu maka dana *Qardhul Hasan* diambil dari dana sosial yang diambil dari pusat.
- 2) Ketentuan tentang syarat berupa imbalan yang harus dipenuhi oleh peminjam pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng yaitu pada awal akad, peminjam dihimbau untuk memberikan imbalan atas tanda jasa pinjaman yang telah diberikan oleh BMT sebesar yang dikehendaki oleh peminjam dan sesuai dengan kemampuannya. Imbalan tersebut akan dimasukkan dalam pendapatan BMT yang kemudian akan dibagikan dalam tabungan anggota dalam bentuk bagi hasil.

- 3) Dari data penelitian tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT tersebut yang kemudian ditarik dalam perspektif hukum Islam, sumber dana dan syarat yang diterapkan di BMT sudah menerapkan ketentuan syariah secara murni.

Dengan alasan:

- a. Sumber dana pada akad *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng yang menggunakan tabungan umum anggota diperbolehkan dengan alasan peminjam mampu mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya dan tidak merugikan BMT selaku *sahibul māl* (pemilik dana).
- b. Dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT UGT Sidogiri cabang Gubeng peminjam dihimbau memberi imbalan atas jasa pinjaman yang diberikan BMT, berhubung peminjam memberi imbalan tersebut dengan sukarela dan tidak ditentukan besar jumlah imbalannya maka hal ini diperbolehkan.

B. Saran

1. Seiring dengan semakin banyaknya lembaga keuangan umum maupun syariah, maka BMT-UGT Sidogiri cabang Gubeng tidak berhenti untuk selalu berinovasi, meningkatkan kualitas dan SDM agar BMT-UGT Sidogiri cabang Gubeng terus berkembang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga menjadi lembaga keuangan yang barokah dan bermanfaat

Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Departemen Agama, *al Qur'an dan Terjemahnya*, 1992.

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2011

Muhammad Akhyar Adnan , “Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)”, <http://journal.uii.ac.id/index.php/JAAI/article/view/397/312>.